

BAB IV

POLITIK DOMESTIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP POLITIK EKONOMI LUAR NEGERI JEPANG

Jepang merupakan negara di Asia Timur yang memiliki perkembangan ekonomi yang mengesankan. Keberhasilan Jepang sebagai negara Superpower Ekonomi Dunia tidak dapat ditafsirkan hanya sebatas dari model kapitalis yang ia gunakan, karena Jepang memiliki model pembangunan yang unik baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial budaya . Meskipun sempat mengalami stagnansi ekonomi setelah bubble economy, namun Jepang kembali bangkit dengan semangat pembangunan ekonomi negaranya. Sehingga perkembangan ekonomi jepang dapat kembali kepada titik pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di dunia.

A. Politik Domestik Jepang

Jepang adalah negara yang menganut sistem politik monarkhi konstitusional dengan parlemen bikameral. Sistem monarki konstitusional merupakan sisitem pemerintahan dimana raja menjadi kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Dalam hal ini, Kaisar tidak memiliki kewenangan

untuk mengatur negara. Kaisar hanya sebagai simbol negara agar masyarakat Jepang dapat tersatukan⁵³.

Sedangkan parlemen bikameral merupakan bentuk parlemen yang mempunyai dua kamar yang mengikuti sistem negara Inggris. Parlemen tersebut terdiri dari Majelis Tinggi (House of Councilors) dan Majelis Rendah (House of Representatives). Majelis Tinggi dan Rendah yang juga disebut Diet dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Majelis Tinggi Jepang berjumlah 252 orang yang⁵⁴ dipilih setiap 3 tahun untuk masa jabatan 6 tahun. Dalam pemilihan Majelis Tinggi, Jepang membaginya menjadi dua, yaitu 100 kursi dipilih secara nasional, 152 kursi dipilih dari setiap propinsi yang jumlahnya ada 47 propinsi. Majelis Rendah Jepang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dengan sistem pemilihan sistem distrik pemilihan ukuran sedang antara 3 sampai 5 calon dari setiap distrik. Pada propinsi Majelis Tinggi dan Majelis Rendah secara bersama-sama memiliki kekuasaan atas perundang-undangan dan kekuasaan untuk memilih Perdana Menteri (Majelis Rendah) dari kalangan anggotanya. Perdana Menteri memilih anggota-anggotanya kabinet lainnya, namun kekuasaannya terbatas oleh Diet yang sewaktu-waktu dapat memilih perdana menteri baru setiap saat.

Cabang eksekutif pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Kabinet Jepang terdiri dari 12 Kementrian dan beberapa pimpinan badan yang

⁵³ Tonny Dian, "Politik dan Pemerintahan Jepang", Power Point bentuk pdf slide 2, Diakses dari <http://tonnydian.staff.umm.ac.id/files/2012/11/Politik-dan-Pemerintahan-Jepang.pdf> pada tanggal 4 Mei 2015.

⁵⁴ Mohtar Masoed dan Colin Mac Andrews, "Perbandingan Sistem Politik", Op cit, Hlm.216-218.

ditunjuk oleh Menteri (departemen). Masing-masing kementerian mempunyai kedudukan yang berbeda. Kementerian yang mempunyai peran kunci besar dalam pembangunan ekonomi sejak Perang Dunia II adalah Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI). Menteri-menteri serta direktur badan-badan di bawah kementerian berasal dari politisi anggota partai mayoritas dalam Diet. Sehingga mereka mempunyai tugas menjadi penghubung antara birokrasi dan parlemen. Birokrasi Jepang memainkan peranan penting dalam hal ini, karena ia juga berwenang merancang sampai menerapkan kebijaksanaan⁵⁵.

Dalam proses pembuatan keputusan, pada awalnya Jepang menggunakan strategi dalam merevolusi politik dalam negeri dengan menggambarkan peran pemerintah yang sangat besar dengan memberi insentif kepada masyarakat bisnis melalui peraturan administratif, subsidi, proteksi, hingga intervensi peninjauan pasar. Disamping itu pemerintah berusaha menjaga stabilitas negara dengan menekan peran oposisi serta memperkuat peran dan pengaruh elit pembangunan yang terdiri dari birokrasi-politisi-pengusaha (swasta) dengan tujuan agar semua perhatian negara tercurah untuk pembangunan ekonomi. Dari sinilah terjalin proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang *interconnected* antara politisi, birokrasi dan pengusaha⁵⁶.

⁵⁵ Mohtar Masoed dan Colin Mac Andrews, "Perbandingan Sistem Politik", Op cit, Hlm. 219.

⁵⁶ Uni Sagena, "Pergeseran Model dan Pembangunan Ekonomi Developmental State Jepang", Jurnal Sosial-Political vol.6, no. 12 (2005): 60, Diakses dari [http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/jsp_vol6_no12_unisagena%20\(03-14-13-04-13-13\).pdf](http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/jsp_vol6_no12_unisagena%20(03-14-13-04-13-13).pdf) pada tanggal 30 April 2015.

Sistem kepartaian Jepang saat ini berasal dari berbagai macam partai (multipartai) dengan dominasi satu partai yaitu Partai Liberal Demokrat (LDP). Partai LDP sebelumnya merupakan pecahan dari Partai Liberal dan Partai Demokrat. Namun, pada tahun (1955-1993) partai tersebut telah mengalami fusi menjadi Partai Liberal Demokrat, dua Partai Sosialis bersatu dalam Partai Sosialis Jepang (JSP), dan Partai Komunis Jepang (PKJ) menjadi partai ketiga⁵⁷.

Sedangkan birokrasi juga memiliki pengaruh yang besar dalam politik Jepang, karena birokrasi mempunyai peran penting dalam menyusun Rancangan Undang-Undang, terutama di perekonomian melalui MITI bersama Diet atau lebih tepatnya partai yang berkuasa. Namun, dalam memutuskan pembentukan RUU sebelumnya telah melalui proses konsultasi intra-kementerian secara intensif, antar-kementerian, serta pendapat dari Diet dan masyarakat umum. Setelah RUU lahir masih menjalani proses pembahasan, penelaahan, dan perubahan dengan melalui persetujuan Komite Penelitian secara keseluruhan yang kemudian berlanjut ke Dean Eksekutif partai. Setelah melewati tahap itu kemudian RUU dibawa ke Biro Legislatif dibawah Kabinet untuk pengecekan akhir, setelah itu RUU siap untuk disetujui oleh kabinet dan diajukan ke Diet⁵⁸.

Dalam proses pembuatan keputusan politik, para pemilih di Jepang memang berpengaruh. Disamping masyarakat umum yang mempengaruhi secara langsung saat pemilihan umum, juga terdapat kelompok-kelompok kepentingan khusus

⁵⁷ Tonny Dian, "Politik dan Pemerintahan Jepang", *Op cit*, Slide.9.

⁵⁸ Mohtar Masoed dan Colin Mac Andrews, "Perbandingan Sistem Politik", *Op cit*, Hlm.229-230.

yang berusaha mempengaruhi keputusan. Kelompok ini adalah kelompok para pengusaha besar. Kelompok ini diintegrasikan secara ketat melalui sejumlah organisasi. Para pengusaha besar ini memiliki peran yang sangat besar dalam membangun industri Jepang .

Ketiganya terjalin dalam hubungan kerja sama yang dikenal dengan “Japan Inc.” atau sering juga disebut dengan segitiga besi (iron triangle). Prinsip kerja dari Japan Inc. adalah bantuan dan perlindungan serta promosi bagi kelompok pengusaha atau bisnis Jepang oleh birokrasi dan politisi.

Namun, peristiwa *bubble economy* membuktikan bahwa kuatnya peran pemerintah dalam intervensi pasar justru membuat pertumbuhan ekonomi Jepang kurang berkembang. Dalam hal ini, karena semakin banyak kemunculan dari kelompok kepentingan dan tuntutan dari ekonomi global. Oleh karena itu, Pemerintah Jepang mendorong kelompok pengusaha Jepang untuk membuka peluang investasi dibidang industri strategis serta industri berbasis pada teknologi.

Pembukaan peluang investasi tersebut mendapat perhatian khusus dari birokrasi terutama Ministry of International Trade and Industry (MITI), memberikan insentif melalui perlindungan maupun penggabungan. Perlindungan terhadap industri tersebut dilakukan pemerintah dengan kebijakan diskriminasi tarif, pajak yang rendah, dan pembatasan impor (melindungi industri domestik dari penetrasi asing). Adapun upaya pengembangan industri ditempuh dengan menyediakan dana berbunga rendah melalui organ-organ finansial pemerintah,

subsidi, pemberian lisensi teknologi asing yang diimpor, penyediaan fasilitas pangkalan industri transportasi. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan promosi ekspor ke pasar internasional, sekaligus melakukan impor bahan mineral mentah demi tercukupinya kebutuhan industri manufaktur, otomotif dan teknologi⁵⁹.

MITI merupakan salah satu birokrasi negara berperan sebagai kunci dalam mengatur ekonomi. MITI menetapkan tujuan-tujuan untuk industri-industri yang lebih spesifik dan memberikan arah bagi pertumbuhan industri Jepang. Adapun fungsi dari MITI adalah 1) Melindungi industri-industri kecil, 2) Mengorganisasikan kembali industri-industri yang mengalami kemunduran (misalnya pertambangan dan pemintalan benang), 3) Membantu pengusaha-pengusaha kecil, 4) Mengontrol kompetisi yang bersifat monopoli melalui kontrol terhadap perluasan kapasitas dan membantu perusahaan yang melakukan peleburan.

Melalui birokrasi dan politisi, kelompok bisnis Jepang berusaha agar kepentingan bisnisnya dapat diakomodir dalam kebijakan yang akan dibentuk. Kepada politisi kelompok bisnis berharap dapat menekan pemerintah dalam memasukan kepentingan bisnis yang ia miliki, sebaliknya bagi politisi partai akan mendapat keuntungan berupa dana yang nantinya akan digunakan sebagai penggerak mesin partai dalam sejumlah kegiatan, terutama saat pemilihan umum. Sedangkan bagi pemerintah atau birokrasi, kelompok bisnis diharapkan dapat

⁵⁹ *Opcit*, Hlm.5.

berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi negara, dengan maksud agar keberhasilan pembangunan ekonomi yang ada nantinya bisa menjadi faktor bagi bertahannya rezim pemerintah tersebut.

B. Kelompok Bisnis Jepang Terkait dengan Bisnis Minerba

Jepang mulai melakukan impor bijih nikel di Indonesia pada saat Indonesia masih dalam pendudukan Hindia-Belanda, melalui perusahaan tambang Hindia Belanda *Mijnbouw Maatschappij Boni-Tolo* tahun 1938, dengan nilai impor yang mencapai 20.000 metrik ton, dan di tahun 1940 jumlah impor nikel mentah mencapai 55.540 metrik ton⁶⁰.

Sampai pada tahun (1942-1945) Jepang menduduki Indonesia dan mengambil alih perusahaan milik Hindia-Belanda melalui kelompok bisnis Jepang bernama *Sumitomo Mining Co.* untuk mengeksploitasi sumber daya mineral nikel mentah untuk di ekspor ke Jepang sebagai bahan baku industrinya. Selain digunakan sebagai bahan keperluan industri, nikel juga dimanfaatkan untuk teknologi tinggi. Hal ini yang membantu terciptanya lapangan kerja dalam negeri Jepang⁶¹.

Paska lepasnya Indonesia dari pendudukan Jepang, impor bijih nikel sempat terhenti sampai tahun 1957. Namun kemudian, digantikan oleh NU Perto

⁶⁰ Anto Sangadji, *Opcit.*

⁶¹ Anto Sangadji, *Opcit.*

yang sekarang menjadi PT Antam mengirim impor nikel mentah ke Jepang untuk keperluan industri.

Sampai pada tahun diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, banyak perusahaan pertambangan Jepang yang melirik investasi dibidang pertambangan, terutama nikel. Terbukti pada 27 juli 1968 beberapa Perusahaan Korporasi Pertambangan dan Konsortium Jepang menerima generasi kontrak karya 30 tahun setelah memenangkan tender melalui PT INCO. Terlebih lagi tahun 1978 PT INCO mengirim bijih nikel ke perusahaan smelter Jepang Shimura Ka Ko Co. Ltd., dan Tokyo Nickel Co. Ltd⁶².

Sampai tahun 1999 PT INCO menjadi perusahaan pertambangan terbesar di dunia. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah Jepang yang mendukung tumbuh kembangnya kepentingan industri dan nikel dalam negerinya melalui lembaga-lembaga keuangan publik agar tetap bias beroperasi di Indonesia. Adapun lembaga-lembaga keuangan tersebut yaitu ⁶³:

1. BNS International
2. Toronto Dominion
3. Bank of Montreal
4. OECF
5. Morgan Guarante Trust

⁶² Anto Sangadji, *Opcit.*

⁶³ Anto Sangadji, *Opcit.*

6. Crocker National bank
7. Kimia Bank of New York
8. Banker Trust Company
9. Asia Pasific Capital Corporation
10. Kanada Ekspor Development Corporation
11. Bank Ekspor- Impor AS
12. JBIC
13. Amerika Utara Bank
14. Perusahaan Saham PT Inco

Secara ringkas penulis menyebutkan beberapa perusahaan pertambangan Jepang yang mempunyai interaksi dibidang investasi dan perdagangan dengan Indonesia, perusahaan tersebut adalah:

1. PT INCO
2. Sumitomo Metal Mining Co.
3. Nischo-Iwa Ltd.
4. Tokyo Nickel Company, Ltd.
5. Shimura Kako Co, Ltd.
6. Mitsui & Co.
7. Sumitomo Shoji Kiasha
8. Kaiser Aluminium and Chemical Corporation
9. Fuji Iron Steel Co.
10. Nippon Yakin Kogyo Co, Ltd.

11. Pacific Nickel Co, Ltd.
12. PT Ingold Maluku Satu
13. Maluku Holding Inc.
14. Dowa Mining Co, Ltd.
15. Mitsubisi Eramet
16. PT Weda By Nickel
17. PT Gerbang Daya Mandiri
18. Mitsui Matsushima Co, Ltd.
19. Mitsubisi

Daftar perusahaan milik Jepang penulis ambil dari berbagai sumber mulai dari awal tahun investasi dan perdagangannya 1942 sampai tahun 2015. Dari perusahaan tersebut, perusahaan yang mempunyai citra yang baik dengan nilai saham yang besar adalah PT INCO.

C. Pengaruh Kelompok Bisnis Terhadap Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Jepang

Salah satu yang menjadi kekuatan ekonomi Jepang adalah industri manufaktur, industri otomotif, peralatan elektronik dan pengembangan robot. Industri otomotif jepang tersebut dikelola oleh AMA (Asosiasi Manufacturers Assosiation) yang didirikan tahun 1967, dengan membawahi 14 perusahaan otomotif lain.

Sikap Pemerintah Jepang terlihat sangat menjaga dan melindungi Perusahaan Korporasi Pertambangannya di Indonesia, agar perusahaan tersebut tetap beroperasi, Jepang melakukan dukungan melalui bantuan Lembaga-Lembaga Keuangan Publik, dengan membantu membangun fasilitas produksi perusahaan, memperlihatkan bahwa Jepang mempunyai kepentingan nasional.

Jepang merupakan Negara yang minim akan sumber daya mineral, sehingga sebagai strategi untuk mencapai tujuan nasional yang berdasar kepentingan nasional Jepang mendorong kelompok bisnis untuk membuka peluang investasi dan perdagangan dibidang pertambangan untuk mendorong perekonomian dalam negeri. Kelompok Bisnis Jepang sangat berperan penting dalam memajukan ekonomi Jepang. Peran tersebut mengingat bahwa Kelompok Bisnis Jepang termasuk dalam Kelompok Kepentingan Assosiasional yang mempunyai sistem yang teratur dan memiliki struktur organisasi yang solid. Terlebih lagi Kelompok Bisnis Jepang bersinergi bersama Politisi dan Birokrasi demi mencapai ekonomi yang mendunia. Kelompok Bisnis akan memberikan kontribusi politik kepada para politisi, terutama masalah sokongan dana pada saat kampanye pemilihan umum. Politisi sebagai gantinya ketika terpilih akan membuat kebijakan yang mendukung kelompok bisnis. Sedangkan hubungan kelompok bisnis terhadap birokrat akan melakukan *amakudari* (pemberian jabatan sebagai top manager di perusahaan milik kelompok bisnis), sebagai gantinya birokrat akan memberikan dukungan terhadap kelompok bisnis dengan *administrative guidance*. Hubungan tersebut merupakan sebuah kerjasama agar kelompok bisnis dapat bersaing dalam

lingkup ekonomi internasional. Berikut empat perusahaan besar Jepang yaitu⁶⁴: *Keidanren (Federation of Economic Organization)*, *Nishio (Japan Chamber of Commerce and Industri)*, *Keizai Doyukai (Japan Committee for Economic Development)*, *Nikkeiren (Federation of Employers Organization)*. Selain itu juga terdapat perusahaan swasta yang bersifat privat. Berikut data yang dapat menggambarkan peringkat Jepang sebagai Negara tujuan ekspor Indonesia:

Tabel 4.1 Nilai Ekspor Bijih Nikel dan Konsentrat (USD)

NO	NEGARA TUJUAN	NILAI (USD)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	JAN-MEI 2012
1	REP. RAKYAT CINA	256.735	26.243.326	276.170.610	230.921.446	151.984.288	348.397.438	1.162.069.111	569.573.225
2	JEPANG	101.316.551	110.441.342	188.578.010	171.112.788	72.693.616	99.008.971	140.467.689	37.850.840
3	UKRAINE	16.431.251	36.883.014	44.568.387	65.544.864	31.504.462	47.818.290	59.477.750	26.846.986
4	YUNANI	4.926.128	10.025.695	42.255.919	21.468.295	10.755.283	18.629.318	25.589.481	16.817.120
5	AUSTRALIA	15.294.786	24.955.001	26.090.844	16.813.847	-	17.136.496	21.001.440	20.508.651
6	INGGRIS	-	-	12.511.376	694.087	6.123.985	-	8.302.568	-
7	HONGKONG	-	-	1	600	4.001.115	-	2.832.240	1.561.640
8	BELANDA	-	-	-	-	-	-	2.803.700	-
9	MONTENEGRO	-	-	-	-	-	-	1.375.000	-
10	AMERIKA SERIKAT	338.787	-	-	400	-	-	1.286.400	-
11	INDIA	-	-	-	-	-	200	1.063.400	-
12	MALAYSIA	-	-	-	875.000	-	-	916.332	-
13	KOREA SELATAN	66.000	4.338.622	5.501.358	-	-	-	855.000	-
14	VATIKAN CITY STATE	1.344.045	-	7.107.759	-	-	-	-	-
15	SWISS	-	4.544.131	-	16.795.667	-	1.455.191	-	-
16	SINGAPURA	732	-	22	7	2.435	225	-	-
17	PERANCIS	-	-	20.000	1.664	37	-	-	-
18	BELGIA	-	-	-	24.643	-	-	-	-
19	KURASAO	-	-	1.522.605	-	-	-	-	-
20	KAMERUN	-	-	1.669.062	-	-	-	-	-
21	KANADA	-	300	-	6.200	-	-	-	-
22	THAILAND	-	-	2.407.900	-	504.000	-	-	-
23	POLANDIA	-	-	20	-	-	-	-	-
	JUMLAH	139.975.015	217.431.431	608.403.873	524.259.508	277.569.221	532.446.129	1.428.040.111	673.158.462
	RATA-RATA PER BULAN	11.664.585	18.119.286	50.700.323	43.688.292	23.130.768	44.370.511	119.003.343	134.631.692

Sumber: Pusdatin Kementerian Perdagangan (Diolah Tim Kajian SDM)

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan, bahwa Jepang menempati posisi kedua sebagai Negara tujuan ekspor bijih nikel tahun (2005-2012). Pada

⁶⁴ Yustisia, "Mengenal Sistem Politik dan Sistem Pemerintahan Jepang", Jurnal No.22/1992, Hlm.4, Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/89012419/Mengenai-Sistem-Politik-Dan-Sistem-Pemerintahan-Jepang#scribd> pada tanggal 4 Mei 2015.

tahun 2005 nilai ekspor bijih nikel dan konsentrat Jepang mencapai 101.336.551 USD. Pada tahun 2006 nilai ekspor tersebut naik di angka 110.441.342 USD, dan di tahun 2007 naik cukup signifikan menjadi 188.578.010 USD. Namun, pada tahun 2008 nilai ekspor nikel turun di angka 171.112.788 USD. Di tahun (2009-2012) nilai ekspor nikel dan konsentrat turun begitu tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2009 menjadi 72.693.616 USD, setahun setelahnya sedikit naik di angka 99.008.971 USD, tahun 2011 mencapai angka 140.467.689, dan ditahun 2012 periode bulan Januari-Mei Jepang harus cukup puas mendapat impor dari Indonesia senilai 37.850.840 USD.

Peringkat Jepang sebagai negara tujuan ekspor Indonesia tidak lepas dari peran kelompok bisnis yang telah berinvestasi di dalamnya. Merupakan hal yang wajar jika pemerintah jepang sangat mendukung upaya kelompok bisnis. Sehingga jika terdapat gangguan impor Jepang, maka kelompok bisnis Jepang akan berusaha menekan pemerintah agar kepentingan kelompok bisnis dapat dipertahankan, mengingat Jepang merupakan negara yang minim akan sumber daya mineral.

D. Sikap Pemerintah Jepang Terhadap Indonesia

Jepang merupakan negara yang cerdas dan kreatif. Jepang melakukan pola umum untuk mensiasati kekurangannya dibidang sumber daya mineral dengan melakukan impor bahan-bahan mineral mentah yang kemudian oleh Jepang diolah menjadi produk jadi dan setengah jadi yang dijual di dalam negeri atau luar negeri (ekspor)⁶⁵.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya mineral melimpah. Hubungan perdagangan keduanya pun mulai terjalin mulai tahun 1942 dan memulai hubungan yang lebih serius setelah pemerintah Indonesia mengundang UU Tentang Penanaman Modal Asing. Hubungan keduanya berlangsung baik tanpa masalah. Selain menjalin hubungan dibidang perdagangan, Jepang juga turut aktif membantu Indonesia melalui bantuan ODA. Namun, bantuan ODA sempat menjadi kritik bagi Jepang kaena dianggap tidak sebanding.

Mulai tahun 2007 Jepang mengupayakan untuk membentuk hubungan yang lebih erat melalui Economic Partnership Agreement. Bentuk kerjasama tersebut diharapkan akan menjadikan kerjasama antara Jepang dan Indonesia semakin terintegrasi.

Namun, memasuki awal tahun 2009 hubungan keduanya kembali bersitegang. Pasalnya, ditahun ini Indonesia mengundang Undang-Undang

⁶⁵Aprilia Novitasari, "Perkembangan Teknologi Jepang dari Masa Restorasi Meiji Sampai Zaman Modern", opcit.

yang mengatur ekspor mineral batubara yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara yang mengatur larangan ekspor mineral mentah. Perusahaan mineral tambang berkewajiban untuk membangun *smelter* (pabrik pemurnian dan pengolahan barang tambang) untuk mengolah mineral mentah sebelum di ekspor ke pasar luar negeri. Pembangunan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 170 bahwa :

“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat- lambatnnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Sehingga dengan adanya UU baru tersebut membuat kelompok bisnis minerna Jepang khawatir akan produksi pertambangannya menjadi terkendala oleh adanya persiapan pembangunan *smelter* yang memakan waktu dan biaya yang tinggi. Untuk membangun *smelter* besi menjadi *sponge iron* dibutuhkan dana investasi sekitar 132 miliar dollar AS. Sedangkan, *smelter* besi menjadi *ping iron* membutuhkan investasi sebesar 165 miliar dollar AS. Kemudian, investasi untuk *smelter* nikel menjadi *feronikel* mencapai 972 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9 triliun. Sedangkan, untuk mengolah nikel menjadi HPAL (*High Pressure Acid Leach*) dibutuhkan dana sekitar 1.160 miliar dollar AS. Adapun untuk dan

mengolah alumina menjadi smelter grade alumina membutuhkan investasi sebesar 1.662 miliar dollar AS⁶⁶.

Dengan jumlah investasi smelter yang fantastis dan memakan waktu, akan mengganggu pasokan impor nikel Jepang dan produksi dalam negeri. Apalagi setelah kebijakan tersebut nanti diimplementasikan, dimana tarif bea keluar atas ekspor produk mineral mentah telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengusaha pertambangan dan investor Jepang berusaha menyampaikan permasalahannya kepada pemerintah Jepang melalui Kementerian Ekonomi Industri dan Perdagangan Jepang karena kepentingannya terganggu.

Mendengar Indonesia membuat Kebijakan baru Penambangan Mineral Batubaranya, Jepang melalui Duta Besarnya Yoshinori Katori berusaha untuk mengkonfirmasi atas adanya kebijakan tersebut. Pemerintah Jepang berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi ketika kebijakan tersebut benar diberlakukan. Perusahaan smelter Jepang akan mengalami kerugian yang cukup besar, dan diperkirakan akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika kebijakan tersebut resmi diimplementasikan.

⁶⁶ Suharto dan Mukhlisin, "Smelter yang Membikin Keder", opcit.